

KEBIJAKAN KEPALA SEKOLAH TERHADAP PELAKSANAAN BIMBINGAN KONSELING DI SMAN 2 LUBUK PAKAM

Pastiria Sembiring, dan Wildansyah Lubis

Email: sembiringpastiria@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimanakah kebijakan kepala sekolah dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di SMA Negeri 2 Lubuk Pakam. Metode Penelitian adalah penelitian kualitatif. Alat pengumpulan data adalah observasi wawancara, dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah guru BK SMA. Temuan penelitian ini adalah kebijakan kepala sekolah terhadap pelaksanaan bimbingan dan konseling telah memberikan layanan informasi, bimbingan kelompok, layanan individual. Dan layanan mediasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan, jenis layanan bk sudah menunjukkan bahwa jenis layanan informasi, layanan bimbingan kelompok, konseling individual, layanan medias, sudah terlaksana dengan baik dalam pelaksanaan BK di sekolah. Anggapan BK sebagai polisi sekolah sudah mulai hilang karena kebijakan kepala sekolah yang menetapkan guru BK tidak boleh menghukum siswa, berarti kepala sekolah sudah memahami peran dan fungsi BK. Simpulan penelitian ini bahwa pada dasarnya kebijakan terhadap pelaksanaan layanan BK diinovasi dan dikembangkan sendiri oleh sekolah dengan kebutuhan dan kondisi sekolah. Kepala sekolah sudah mengetahui dan memahami peran serta tanggung jawab terhadap pelaksanaan layanan BK.

Kata kunci : *kebijakan, kepala sekolah, pelayanan BK*

Abstract: This research can be done to find out how to solve the problem in SMA Negeri 2 Lubuk Pakam. This research method is qualitative research. Data tools are observation interviews, documentation. The subjects of this study are guidance and counseling teachers. The findings of this study are the principal's policy on the implementation of guidance and counseling that has provided information services, group guidance, individual services. And mediation services. The results showed that guidance and counseling service policy has indicated the type of information service, guidance services group, individual counseling, media service, had been implemented well in the implementation of Guidance and Counseling in schools. Assumptions Guidance and Counseling as a school police have begun to disappear because the policy of the principal who sets the teacher Guidance and Counseling should not punish the students, meaning the principal already understand the role and function of Guidance and Counseling. The conclusions of this study on the novelty of the implementation of Guidance and Counseling services are innovated and developed by the school with some criteria that need and condition of the school. Principals already know and understand the role and responsibility of the implementation of Guidance and Counseling services.

Keywords: *policy, principal, guidance and counseling services*

A. PENDAHULUAN

Keberhasilan program layanan bimbingan dan konseling di sekolah tidak hanya ditentukan oleh keahlian dan keterampilan para petugas bimbingan dan konseling, namun juga ditentukan oleh komitmen dan keterampilan seluruh staf sekolah, terutama dari kepala sekolah sebagai administrator Dan supervisor. Kepala sekolah bertanggungjawab terhadap kelancaran

pelaksanaan seluruh program sekolah, khususnya program layanan bimbingan dan konseling di sekolah yang dipimpinya.

Adanya layanan bimbingan dan konsling di sekolah untuk memberi dukungan pada pencapaian kematangan kepribadian dan keterampilan sosial pada siswa. Selain itu bimbingan dan konseling pendukung pencapaian kemampuan akademik, yang akhirnya

bermuara pada terbentuknya kematangan karir individual yang diharapkan dapat bermanfaat pada masa depan para anak didik.

Oleh karena itu pelayanan Bimbingan dan Konseling mempunyai peranan penting dalam membantu siswa memilih dan menentukan arah peminatan kelompok mata pelajaran. Agar dapat menentukan pilihan yang sesuai kemampuan potensi dirinya dan berhasil dalam belajar. Pelayanan Bimbingan dan konseling dalam kurikulum 2013 khususnya di SMA mempunyai tugas khusus yaitu membantu siswa memilih dan menentukan arah peminatan kelompok mata pelajaran arah pengembangan karir, dan menyiapkan diri dan memilih pendidikan lanjutan ke perguruan tinggi sesuai dengan kemampuan dasar umum, bakat, minat dan kecenderungan pilihan masing-masing siswa.

Namun, implementasi layanan bimbingan dan konseling yang ideal itu berhadapan dengan berbagai hambatan dan sejumlah kendala. Banyak orang menganggap bahwa bimbingan dan konseling hanya Penangani anak yang bermasalah saja, atas pelanggaran tata tertib yang dilakukannya saja. Munculnya pola sikap negatif dan kenakalan siswa sering dianggap sebagai dampak kurang berfungsinya layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Tugas kepala sekolah tersebut di atas diharapkan dapat diterapkan oleh kepala sekolah di semua sekolah agar bisa merangsang kegiatan bimbingan dan konseling.

Akan tetapi kenyataannya di lapangan, masih banyak kepala sekolah yang memberikan kebijakan yang tidak sesuai misalnya dengan memberikan tugas kepada guru bimbingan dan konseling untuk menghukum atau memberi sanksi kepada siswa, sehingga

banyak siswa yang menganggap BK polisi sekolah, selain itu ada juga sebagian yang absen, ada juga beberapa sekolah yang tidak memberikan kesempatan jam BK untuk masuk kelas, sehingga guru BK menjadi sulit untuk lebih dekat dan memahami siswa.

Persoalan yang menimpa siswa menjadi salah satu penyebab penurunannya prestasi belajar. Banyak guru BK yang dasar ilmunya tidak sesuai ilmu yang telah diambilnya sebelumnya. Akibatnya guru BK sering tidak memahami yang harus dilakukannya. Apa yang dilakukan pada akhirnya lebih kepada hal-hal administrasi. Bahkan sampai muncul anggapan sekolah siswa bahwa guru BK adalah dan hanya menangani siswa yang nakal. Dengan demikian, guru BK tidak sebatas mengatasi masalah, tetapi juga berfungsi sebagai tempat untuk pengembangan diri siswa. Dari yang telah diperoleh berdasarkan fenomena di lapangan, menunjukkan beberapa kebijakan kepala sekolah terhadap layanan bimbingan dan konseling yang tidak sesuai.

Kepala sekolah sebagai penanggung jawab pelaksanaan teknis bimbingan dan konseling di sekolah. Dalam melaksanakan tugas-tugas kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah dan sekaligus menyusun dan mengatur program bimbingan dan konseling sedemikian rupa agar program tersebut dapat bersatu terlaksana bersamaan dengan program pendidikan serta sebagai penanggung jawab kegiatan pendidikan secara menyeluruh di sekolah.

Dari paparan di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul ini kebijakan kepala sekolah terhadap pelayanan bimbingan dan konseling di SMA Negeri 2 Lubuk Pakam.

Kebijakan menurut Harman (dalam Fattah, 2012:135) kebijakan adalah sebagai spesifikasi implisit atau eksplisit dari serangkaian tujuan tindakan yang diikuti terkait dengan pengenalan masalah penting dan petunjuk untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sementara Hogwood dan Guun (dalam Fattah, 2012:135) kebijakan adalah sebagai label untuk bidang kegiatan, kebijakan sebagai suatu ekspresi umum dari tujuan umum atau keadaan yang diinginkan. Kebijakan juga merupakan suatu keadaan atau pendirian yang dikembangkan untuk merespon masalah atau konflik yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Carley (dalam Fattah, 2012:136) ada tiga unsur kebijakan yaitu pertama kebijakan politis tentang nilai-nilai yang akan dialokasikan, kedua determinasi rasional melalui langkah-langkah tertentu dan ketiga perlunya pengakuan bahwa struktur birokrasi akan mempengaruhi pencapaian kebijaksanaan.

Berdasarkan atas penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijaksanaan merupakan serangkaian tindakan yang dikembangkan untuk untuk merespon terkait dengan keadaan atau permasalahan penting yang diikuti untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

William Dunn (234-239) menjelaskan ada sejumlah model analisis kebijakan yaitu :

1. Model deskriptif

Tujuannya adalah menjelaskan atau memprediksikan sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi dari pilihan-pilihan kebijakan. Model deskriptif digunakan untuk memantau hasil-hasil dari hasil kebijakan.

2. Model Normatif

Model ini bertujuan bukan hanya menjelaskan dan memprediksikan, tetapi

juga memberikan dalil dan rekomendasi untuk mengoptimalkan pencapaian beberapa nilai. Masalah-masalah keputusan normatif biasanya dalam butuh mencari nilai-nilai variabel yang terkontrol (kebijakan) yang akan menghasilkan manfaat terbesar (nilai) sebagai terukur dalam variabel. Salah satu model normatif yang paling sederhana dalam dunia pendidikan contohnya adalah bagaimana penentuan standar kelulusan bagi siswa kelas III. Dampaknya banyak sekolah yang berupaya mencapai standar tersebut dengan berbagai cara baik yang sehat dan rasional maupun yang tidak sehat melanggar aturan yang telah ditetapkan.

3. Model Verbal

Model verbal diekspresikan dalam bahasa sehari-hari bahasa logika simbolis dan matematika. Dalam menggunakan model verbal, analisis berdasar pada penilaian nalar untuk membuat penilik dan menawarkan rekomendasi. Penilaian nalar menghasilkan argumen kebijakan, bukan dalam bentuk nilai-nilai angka. Keterbatasan model verbal adalah bahwa masalah-masalah yang digunakan untuk memberikan prediksi dan rekomendasi bersifat implisit atau tersembunyi sehingga sulit untuk memahami dan memeriksa secara kritis argumen-argumen sebagai keseluruhan.

4. Model simbolis

Model Simbolis menggunakan simbol-simbol matematika untuk menerangkan berhubungan antara variabel-variabel kunci yang dipercaya memiliki sifat suatu masalah.

5. Model prosedural

Menurut Fattah (2012, 63:64) model ini menampilkan hubungan yang dinamis diantara variabel-variabel yang diyakini menjadi suatu ciri masalah kebijakan. Prediksi-prediksi dan solusi optimal diperoleh mensimulasikan dan

meneliti seperangkat hubungan yang mungkin.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ada sejumlah model yang bisa digunakan dalam menganalisa kebijakan yaitu model deskriptif dan model normatif, model deskriptif berupaya menggambarkan dan menjelaskan sesuatu, atau memprediksi sebuah variabel yang dapat mereaksi perubahan dari sesuatu bagian sebuah sistem.

Pengertian Kepala Sekolah merupakan sebuah organisasi yang didalamnya terdapat sumberdaya yang paling terkait yang memiliki tujuan untuk mendidik dan memanusiaikan manusia. Kepala sekolah dalam kamus besar Bahasa Indonesia (Depdinas : 549) diartikan sebagai orang (guru) yang memimpin satu sekolah atau bisa disebut guru kepala. Wahjosumidjo (2002:83) mengartikan kepala sekolah merupakan seorang tenaga fungsional guru yang diberikan tugas memimpin suatu sekolah, dimana diselenggarakan proses belajar mengajar. Kepala sekolah juga dapat disebut seorang manajer didalam organisasi sekolah karena kepala sekolahlah yang mengelola dan mendayagunakan seluruh sumber daya manusia yang ada di sekolah. Dalam meningkatkan mutu pendidikan disekolahnya, kepala sekolah memiliki peran-peran yang harus dijalankannya. Peran kepala sekolah dapat digolongkan menjadi tujuh pokok yaitu yakni sebagai educator, sebagai manajer, sebagai administrator, sebagai supervisor, sebagai inovator, dan sebagai leader dan sebagai motivator.(emaslim).

Sebagai paparan diatas konsep kepala sekolah dalam penelitian ini adalah pemimpin dan pengelola dalam organisasi sekolah yang memiliki peranan sebagai pendidik, manajer,

administrator, supervisor, pemimpin, inovator, dan motivator.

Kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah pada semua jenjang memiliki tugas pokok, salah satunya mencakup bidang tugas manajerial. Tugas manajerial berkaitan dengan pengelolaan semua sumberdaya yang ada di sekolah. Kepala sekolah harus mampu memberdayakan semua sumber daya yang harus dikelola oleh kepala sekolah yaitu : 1) tenaga pendidik dan kependidikan, 2) Pembiayaan, 3) Sarana prasarana 4), kesiswaan, 5) pembelajaran, 6) perpustakaan, 7) laboratorium, 8) peran serta masyarakat, 9) sistem informasi sekolah, dan lain-lain. Dengan demikian aktivitas kepala sekolah yang berkaitan dengan tugas manajerial sebagai berikut:

1. Menyusun rencana sekolah
2. Mengelola program pembelajaran
3. Mengelola kesiswaan
4. Mengelola sarana dan prasarana
5. Mengelola personal sekolah
6. Mengeola keuangan sekolah
7. Mengelola hubungan sekolah dan masyarakat
8. Mengelola administrasi sekolah
9. Mengelola sistem informasi sekolah
10. Mengevaluasi program sekolah
11. Memimpin sekolah (Kemendiknas dalam Suhardiman, 2012:38-3).

Berdasarkan uraian di atas tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah sebagai manajer sekolah memiliki tugas pokok dan kompetensi yang berkaitan dengan pengelolaan seluruh sumber daya yang meliputi mengelola tenaga pendidik, siswa, keuangan, kurikulum, humas, fasilitas, dan komponen yang lain, untuk dapat didaya gunakan semaksimal mungkin, sehingga dapat terarah pada pencapaian tujuan sekolah secara efektif dan efisien.

Pengertian bimbingan dan konseling adalah menurut Dewa Ketut Sukardi (2008:37) bimbingan adalah proses

pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor (guru pembimbing) kepada seseorang atau sekelompok orang yang menjadi pribadi yang mandiri. Syamsu Yusuf L.N. (2009:38) menyatakan bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang diberikan konselor kepada individu secara berkesinambungan agar individu memahami potensi diri dan lingkungannya, dapat menerima diri, mengembangkan diri dan menyesuaikan diri sehingga dapat mencapai kehidupan yang bermakna, baik secara personal maupun sosial.

Konseling merupakan bagian dari bimbingan baik sebagai layanan maupun sebagai teknik. Prayitno (2004:105) konseling sebagai proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli (disebut konselor) kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah (disebut klien) yang bermuara teratasinya masalah yang dihadapi oleh klien.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut diatas dapat disimpulkan bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang diberikan guru pembimbing dan konseling/konselor yang dilakukan secara berkesinambungan kepada individu agar individu dapat memahami potensi dirinya, dapat menerima dan mengembangkan dirinya, dapat mencapai kehidupan yang bermakna dan mandiri. Konseling adalah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh seseorang (konseling) yang dilakukan dengan wawancara dan bersifat rahasia untuk mengatasi permasalahan yang dialami konseli. Menurut Sertzer & Stone dalam Smit yang dikutip Prayitno (2004:100), mengemukakan bahwa konseling merupakan suatu proses dimana konselor membantu konseli dalam menyusun interpretasi-interpretasi tentang fakta-

fakta yang berhubungan dengan pilihan, rencana penyesuaian-penyesuaian yang perlu disusunnya.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan konseling adalah proses pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik secara individual maupun kelompok, agar mampu mandiri dan berkembang secara optimal, dalam bidang pengembangan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kemampuan belajar, dan perencanaan karir, melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung, berdasarkan norma-norma yang berlaku.

a. Kedudukan Bimbingan dan Konseling dalam pendidikan di sekolah

Pendidikan di sekolah bertujuan untuk menghasilkan perubahan-perubahan positif dalam diri siswa yang sedang berkembang menuju kedewasaannya secara utuh. Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam pendidikan di sekolah telah dikembangkan 3 sub sistem yang meliputi, administrasi, pengajaran, bimbingan dan konseling. Menurut Mortensen dan Schumuller (1976) yang dikutip Prayitno (2004:240):

1. Bidang kurikulum dan pengajaran

Bidang ini meliputi semua bentuk pengembangan kurikulum dan pelaksanaan pengajaran, yaitu penyampaian dan pengembangan dan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kemampuan berkomunikasi peserta didik.

2. Bidang Administrasi dan Supervisi

Bidang ini meliputi berbagai fungsi berkenaan tanggung jawab dan pengambilan kebijaksanaan, serta bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan dan administrasi sekolah seperti perencanaan, pembiayaan, dan pengadaan pengembangan staf,

prasarana dan sarana fisik dan pengawasan.

3. Bidang Bimbingan dan Konseling

Bidang ini meliputi berbagai fungsi kegiatan yang mengacu kepada pelayanan kesiswaan secara individual agar masing-masing peserta didik dapat berkembangsesuai dengan bakat, minat, dan tahap-tahap perkembangannya.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kebijakan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kebijakan bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan kepala sekolah terhadap pelayanan guru bimbingan dan konseling. Penelitian kebijakan bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi yang menjadi dasar bagi perumusan kebijakan, menunjang implementasi kebijakan, atau untuk mengetahui kinerja dampak dari kebijakan (Mulyatiningsih, 2011 : 207).

Penelitian ini merupakan penelitian tentang kebijakan kepala sekolah bertanggung jawab menjalankan tugas dan fungsinya terhadap pelanan bimbingan konseling di sekolah SMA Negeri 2 Lubuk Pakam.

Subjek penelitian ini 4orang guru BK 3 orang berpendidikan S2 satu orang lagi tamatn S1 jurusan bimbingan dan konseling.lagi merupakan penelitian tentang kebijakan kepala sekolah terhadap pelayanan bimbingan dan konseling meliputi kepala sekolah, guru dan siswa. Subjek penelitian yang pertama adalah kepala sekolah, dan selanjutnya adalah guru Bimbingan dan Konseling di sekolah sebagai pelaku/pelaksana dari kebijakan yang berkaitan denga kegiatan proses pembelajaran di sekolah.Sabjek penelitian terakhir adalah siswa terdiri dari X karena siswa merupakan pihak yang diberikan layanan

bimbingan dan konseling yang diberikan oleh guru BK.

Data yang dikumpulkan adalah data tentang yang berhubungan dengan fokus penelitian kebijakan kepala sekolah terhadap pelayanan bimbingan dan konseling. Menurut Afifudin dan Seibadi (2009:119), data dibagi dua yaitu data primer dan data skunder. Data primer adalah datayang diperoleh dalam bentuk verbal atau kata-kata dan perilaku dari subjek (informan), dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru BK, dan beberapa siswa. Sedangkan data skunder adalah data yang dapat dari dokumen dan kegiatan yang mencerminkan kebijakan kepala sekolahterhadap pelayanan bimbingan dan konseling.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan angket, angket meruakan sejumlah pernyataan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dalam arti laporan tentang pribadinya. Angket yang digunakan oleh peneliti adalah angket tertutup. Angket disusun berdasarkan skala likert skala 1 sangat sesuai (ss), skala 2 sesuai (s), skala 3 tidak sesuai (ts), skala 4 sangat tidak sesuai (sts). Pengumpulan data merupakan semua kegiatan peneliti dalam mencari dan mengumpulkan data selama penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berikut merupakan rincian dari ketiga teknik tersebut:

1. *Observasi*

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala dalam objek penelitian (Afifudin dan Sarbani 2009: 134). Sugiyono (2011: 196) menyatakan bahwa observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan ciri yang spesifik dan tidak terbatas pada orang

melainkan pada objek yang lain misalnya perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan sebagainya. Sedangkan Sutoyo (2009: 112) menyatakan bahwa observasi adalah proses pengamatan yang disertai dengan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dan gejala-gejala yang perlu diamati.

Dari pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian. Sugiyono (2011: 310-312) membagi observasi menjadi tiga macam yaitu (a) observasi partisipatif yaitu observasi dimana peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian, (b) observasi terstruktur dan terencana adalah observasi dimana peneliti dalam mengumpulkan data terkadang berstruktur terencana bahwa dia melakukan penelitian tetapi terkadang tidak berstruktur terencana, dan (c) observasi tak terstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis hal yang diamati karena fokus penelitiannya belum jelas. Penelitian ini menggunakan jenis observasi terstruktur dan terencana dimana peneliti terkadang mengatakan pada informan bahwa dia melakukan penelitian akan tetapi terkadang tidak mengatakan pada informan. Selain itu, tujuan dari observasi ini adalah untuk mendeskripsikan aktivitas yang berlangsung dan orang-orang yang terlibat pada kebijakan kepala sekolah terhadap pelayanan bimbingan dan konseling. Data yang diperoleh akan disesuaikan dengan rancangan *checklist* yang telah disusun oleh peneliti, apabila ada data yang tidak ada di dalam *checklist* maka data akan dicatat di buku catatan lapangan yang selalu dibawa oleh peneliti.

Pengumpulan data melalui observasi memiliki beberapa kekurangan seperti yang dinyatakan oleh Sutoyo (2009: 80-82) yaitu: 1) Keterbatasan kemampuan manusia dalam menyimpan hasil pengamatan 2) Cara pandang individu yang berbeda 3) Perbedaan kesan terhadap suatu objek 4) Kecenderungan penilaian individu dalam menilai yang terlalu tinggi atau terlalu rendah 5) Untuk mengatasi kekurangan tersebut peneliti memanfaatkan alat bantu observasi seperti camera video, menetapkan definisi operasional, menetapkan parameter yang jelas, melibatkan observer yang lebih sebagai pelengkap, dan mengupayakan agar subjek yang sedang diobservasi tidak tahu bahwa ia sedang diobservasi (Sutoyo 2009: 113).

2. Wawancara

Wawancara menurut Afifudin dan Saebani (2009: 131) menyatakan bahwa wawancara merupakan metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden. Arikunto (2006: 155) menyatakan wawancara merupakan sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Sedangkan Sugiyono (2011: 188) menyatakan wawancara adalah teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang diteliti dan apabila peneliti ingin mendapat informasi yang mendalam dengan jumlah responden yang terbatas. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa wawancara merupakan salah satu alat pengumpul data yang dilakukan dengan melakukan dialog dengan sumber data untuk mencapai tujuan dari suatu penelitian.

Selanjutnya Sugiyono (2011: 317-318) membagi wawancara menjadi tiga

macam yaitu (a) wawancara terstruktur yaitu wawancara dimana peneliti telah mengetahui pasti informasi yang akan diperoleh dan peneliti telah menyiapkan rangkaian pertanyaan untuk wawancara; (b) wawancara tak terstruktur adalah wawancara dimana peneliti tidak menyiapkan panduan wawancara dan lebih bersifat bebas; dan (c) wawancara semi terstruktur merupakan paduan antara wawancara terstruktur dan tak terstruktur, dimana peneliti melakukan wawancara lebih bebas namun peneliti juga menyiapkan panduan wawancara. Penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur, dimana peneliti menyiapkan daftar pertanyaan yang menyangkut objek penelitian yaitu manajemen bimbingan dan konseling dan apabila saat melakukan wawancara ada hal-hal yang dirasa peneliti kurang mendalam maka peneliti dapat mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Peneliti menentukan informan yang pertama diwawancarai adalah kepala sekolah karena kepala sekolah merupakan sumber utama penyusun kebijakan di sekolah. Selain itu, dilakukan juga wawancara tambahan kepada guru BK di sekolah dan beberapa siswa, dilakukan untuk mengkroscekkan kebenaran jawaban dari responden dalam penelitian ini yaitu kepala sekolah.

Pengumpulan data melalui interviu menurut Sutoyo (2009: 137-139) memiliki kelebihan yaitu: 1) Metode terbaik untuk menilai keadaan pribadi 2) Tidak dibatasi oleh tingkatan umur dan pendidikan subjek yang sedang diteliti 3) Terkadang menjadi metode primer dan pelengkap 4) Sebagai alat verifikasi terhadap data observasi, kuesioner dan lain-lain 5) Dapat dilaksanakan sambil melakukan observasi Selanjutnya Sutoyo (2009: 139-141) juga mengungkapkan

kelemahan dari wawancara sebagai berikut: 1) Kurang efisien 2) Tergantung dengan ketersediaan, kemampuan dan waktu yang tepat dari interviewee 3) Jalan dan interviu sangat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan sekitar yang memberikan tekanan yang mengganggu 4) Membutuhkan interviewer yang benar-benar menguasai bahasa interviewee 5) Akan membutuhkan banyak interviewer jika pendekatan „sahabat karib“ dilakukan maka meneliti masyarakat yang heterogen 6) Sulit menciptakan situasi yang terstandar sehingga kehadiran interviewer tidak mempengaruhi responden dalam memberikan jawaban. Untuk mengatasi permasalahan selama melakukan wawancara, peneliti menggunakan perekam data berupa lembar catatan lapangan dan *handphone* sebagai alat bantu merekam. Setelah selesai melakukan wawancara, peneliti akan mencatat pada buku catatan lapangan dan menganalisis hasil wawancara serta memilah-milah data yang diperoleh.

3. Dokumentasi

Arikunto (2006: 231) menyatakan metode dokumentasi yaitu metode mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya. Moleong (2005: 216-217) menyatakan dokumen adalah sumber data berupa bahan tulis ataupun film yang dapat berupa dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumentasi ini berguna untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi, selain itu dokumentasi juga dapat digunakan sebagai pengecek dari data yang dikumpulkan oleh peneliti.

Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang terkait dengan objek 58 penelitian yaitu kebijakan kepala sekolah

terhadap pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah seperti surat keputusan (SK) kepala sekolah yang mengatur pembagian tugas guru, jadwal jam BK, jumlah guru BK, catatan lapangan, foto dan sebagainya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Pada bab ini temuan hasil penelitian adalah kebijakan kepala sekolah terhadap pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling telah memberikan jenis layanan layanan informasi, layanan bimbingan kelompok, layanan mediasi, layanan konselin individual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis layanan bimbingan dan konseling telah terlaksana dengan baik.

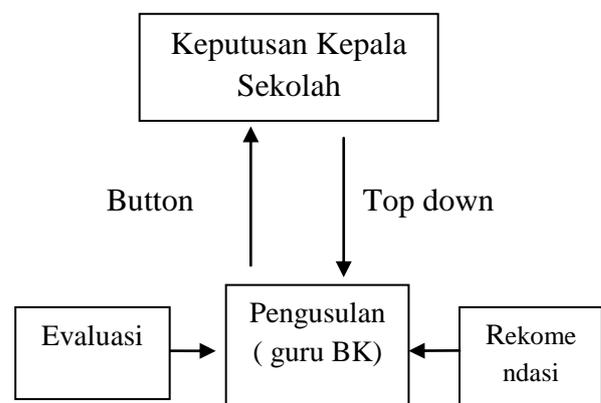
Pada dasarnya setiap sekolah mengimplementasikan kebijakan turunan dari kebijakan pendidikan nasional dan berdasarkan aturan yang ada dari pusat, akan tetapi diinovasi dan dikembangkan sendiri oleh sekolah sesuai dengan kebutuhan dari masing – masing sekolah.

Kebijakan adalah pembuatan/ perumusan suatu kebijakn oleh kepala sekolah yang berkaitan dengan pelayanan bimbingan dan konseling.Tahapan dalam proses penyusunan kebijakan kepala sekolah terhadap bimbingan dan konseling yang ada di SMA N 2 Lubuk Pakam adalah leading sektor ide yang muncul biasanya berasal dari kepala sekolah. Setelah kepala sekolah meyakini bahwa ide itu benar, maka akan diadakan brainstoarming (curah gagasan) dengan meminta pendapat dari berbagai pihak terkait, apakah ide tersebut bisa dilaksanakan menjadi sebuah program atau tidak,apabila mendapat support yang cukup, maka program tersebut bisa dilaksanakan.

Walaupun biasanya ide muncul dari kepala sekolah, tetapi tidak menutup kemungkinan ide tersebut muncul dari berbagai pihak,misalnya guru..Seperti di SMA N 2 Lubuk Pakam yang alur perumusan atau penyusunan kebijakannya adalah:

- 1) Evaluasi ,yaitu mengevaluasi program BK yang telah dilaksanakan pada tahun ajaran sebelumnya;
- 2) Rekomendasi dari berbagai pihak, termasuk di dalamnya perbaikan program yang lalu;
- 3) Pengusulan ,yaitu guru BK dengan berbagai permasalahan dan kebutuhannya mengusulkan kepada kepala sekolah apa saja yang dibutuhkan dan apa yang akan dikembangkan untuk program BK (bottom up);
- 4) Keputusan kepala sekolah ,setelah mendapatkan usulan dari guru BK dan dengan berbagai pertimbangan maka usulan tersebut derealisasikan menjadi kebijakan (top down). Jadi kepala sekolah melakukan kolaborasi dengan guru BK, tergantung kepentingannya seperti apa.

Dibawah ini bagan formulasi kebijakan kepala sekolah terhadap BK di SMA N 2 Lubnk Pakam:



Gambar 1. Formulasi kebijakan kepala sekolah terhadap BK di SMA N 2 Lubuk Pakam

Tahapan selanjutnya adalah implementasi kebijakan yaitu perwujudan dan realisasi dari keputusan yang telah menjadi kebijakan dari kepala sekolah SMA N 2 Lubuk Pakam yang berkaitan dengan bimbingan dan konseling. Cara yang dilaksanakan agar sebuah kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan yaitu ide atau keputusan yang telah menjadi kebijakan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam program sekolah, salah satu bentuknya yaitu dengan menuangkan ke dalam surat keputusan (SK) kepala sekolah terutama mengenai pembagian tugas guru yang kemudian diturunkan lagi ke jadwal. Setelah kebijakan tersebut dimasukkan ke dalam program, maka tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan atau pengimplementasian dari program tersebut. Dalam pengimplementasian ini, komunikasi dengan pihak-pihak terkait juga tidak ditinggalkan, seperti dengan waka, wali kelas, BK, guru, dan kepala sekolah.

Evaluasi diadakan untuk mem- pelajari pencapaian sasaran dan tujuan yang telah dicapai. Evaluasi yang dilakukan oleh kepala sekolah SMA N 2 Lubuk Pakam terhadap kebijakan yang telah dilaksanakan yaitu berupa:

Evaluasi dilaksanakan secara intern dengan guru BK yang bersangkutan. Evaluasi ini bisa bersifat formal maupun informal, artinya evaluasi ini tidak harus dilakukan secara resmi, namun bisa juga dilakukan hanya sekedar mengobrol biasanya seperti sharing antara kepala sekolah dengan guru BK.

Kepala sekolah melakukan monitoring terhadap program BK yang dilaksanakan. Monitoring itu berupa pemantauan oleh kepala sekolah, baik pada saat guru BK memberikan pelayanan, maupun disat menangani masalah. Selain monitoring, evaluasi juga

dilakukan dengan cara guru BK memberikan laporan kepada kepala sekolah. Laporan tersebut bisa berupa perkembangan dari pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan maupun kesulitan yang ditemui dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Mengadakan pertemuan berkala dengan guru BK untuk melakukan evaluasi, biasanya evaluasi yang terjadwal adalah setiap satu semester sekali yaitu pada akhir semester untuk mengevaluasi hasil pencapaian tujuan dan sasaran dari kebijakan yang telah dilaksanakan selama satu semester terakhir. Selain pertemuan yang terjadwal, bisa juga diadakan pertemuan yang bersifat insidental yaitu pertemuan yang tidak direncanakan. Hal ini bisa dilakukan apabila dalam proses pelaksanaan kebijakan tersebut, guru BK mengalami suatu masalah, hambatan maupun kesulitan, maka guru BK tersebut bisa mengkomunikasikannya dengan pihak-pihak sekolah yang terkait terutama kepala sekolah.

Kepala sekolah mempunyai kewajiban menyediakan sarana prasarana, tenaga, dan berbagai fasilitas lainnya untuk kemudahan bagi terlaksananya pelayanan bimbingan dan konseling yang efektif dan efisien. Fasilitas sarana dan prasarana tersebut antara lain adalah:

Ruangan BK merupakan aspek yang sangat penting yang harus diperhatikan karena ruang BK juga mempunyai peran dalam menentukan keberhasilan suatu program layanan bimbingan dan konseling. Ruangan BK diharapkan menjadi tempat yang nyaman dan menyenangkan bagi siswa dalam melakukan layanan BK agar layanan bimbingan dan konseling berfungsi secara efektif.

Guru BK seyogyanya telah menempuh pendidikan bimbingan dan konseling, agar guru BK berkompeten dan profesional sehingga pelayanan guru BK bisa di berikan secara optimal dan tujuan layanan bisa tercapai. Namun berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, masih terdapat guru BK SMA N 2 Lubuk Pakam.

Prosedur pengangkatan guru BK untuk yang sudah PNS, semua diangkat oleh pemerintah karena seleksi penerimaan CPNS bukan wewenang dari sekolah dan bukan sekolah yang mengadakan seleksi. Seleksi dilakukan oleh pemerintah pusat, sekolah tinggal menerimanya saja. Sedangkan untuk penerimaan guru tidak tetap (GTT), kriterianya adalah:

- 1) Latar belakang pendidikannya adalah S1 Bimbingan dan Konseling, atau S1 Psikologi dan telah mempunyai akta mengajar (Akta IV)
- 2) Nilai akademik pada saat kuliah bagus
- 3) Hasil wawancara (interview) pada saat seleksi
- 4) Lebih mengutamakan alumni sekolah tersebut.

Koordinator BK merupakan orang yang dipercayai untuk menjadi ketua dari guru BK di sekolah. Tugas dan tanggung jawab koordinator bimbingan dan konseling adalah:

- 1) Mengoordinasikan para konselor dalam memasyarakatkan pelayanan bimbingan, menyusun, melaksanakan dan menilai program, mengadministrasikan kegiatan bimbingan,
- 2) Membuat usulan kepala sekolah dan mengusahakan terpenuhinya tenaga, sarana dan prasaranan.
- 3) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling kepada kepala sekolah

Kewajiban kepala sekolah salah satunya adalah memberikan kemudahan –kemudahan bagi terlaksananya program BK di sekolah. Pada dasarnya setiap kepala sekolah di SMA N 2 Lubuk Pakam memberikan kemudahan bagi terlaksananya program BK di sekolah. Kemudahan yang di berikan oleh kepala sekolah antara lain:

- 1) Memberikan perhatian lebih pada guru BK.
- 2) Berupaya sering berada di tengah tengah guru BK.
- 3) Sering memberikan dorongan dan motivasi.
- 4) Apabila meminta fasilitas, waktu dan peralatan, kepala sekolah berupaya untuk merealisasikannya sejauh tidak kontradiktif dengan sekolah.
- 5) Memberikan kemudahan kepada guru BK untuk berinovasi dan berkreasi selama kegiatan itu realistis, tidak melanggar aturan, memberi banyak manfaat, dan kegiatan tersebut bertujuan untuk membangun karakter siswa.
- 6) Memberikan kemudahan perijinan untuk mengikuti MGBK dan kegiatan lainnya yang berhubungan BK.

Kepala sekolah mempunyai untuk mengkoordinasikan segenap kegiatan yang diprogramkan bimbingan konseling di masing – masing sekolah. Di SMA N 2 LUBUK pAKAM , program disusun di awal tahun, biasanya setiap semester diadakan koordinasi untuk berdiskusi. Koordinasi itu berupa evaluasi program semester lalu kemudian apabila ada permasalahan maka direncanakan tidak lanjut dari permasalahan itu. Koordinasi melibatkan kepala sekolah, koordinasi BK, dan guru BK, serta melibatkan pihak- pihak lainnya yang terkait dan disesuaikan dengan kebutuhannya. Koordinasi harus selalu diadakan, karena apabila tidak ada koordinasi maka

kegiatan yang diprogramkan tersebut tidak mendapat ijin dari kepala sekolah. Dengan adanya koordinasi juga bertujuan supaya mendapat support, baik support anggaran maupun support waktu dari sekolah.

Namun berdasarkan hasil wawancara dengan guru BK disekolah, menurut mereka koordinasi program BK jarang sekali dilakukan oleh kepala sekolah, menurut mereka koordinasi guru BK membuat program sendiri tanpa koordinasi dengan kepala sekolah terlebih dahulu. Koordinasi guru BK dengan kepala sekolah hanya sebatas untuk meminta persetujuan dan menandatangani program BK tersebut.

Siswa di SMA N 2 Lubuk Pakam sudah tidak menganggap BK sebagai polisi sekolah, sudah ada pandangan positif dari siswa mengenai BK, terbukti dengan terlihatnya suasana yang akrab antara guru BK dengan siswa, juga kesadaran siswa yang menganggap BK polisi sekolah terutama siswa kelas XI, hal ini disebabkan siswa kelas XI masih terbawa suasana BK di SMP. Upaya kepala SMA N 2 Lubuk Pakam tidak menjadikan guru BK sebagai polisi sekolah antara lain adalah:

- 1) Guru BK diberikan tugas tambahan yaitu melayani siswa yang berkebutuhan, khususnya kebutuhan ekonomi. Guru BK sangat memberikan perhatian kepada siswa yang kurang mampu sehingga dengan cara – cara seperti itu siswa menjadi merasa terlayani dan mengurangi anggapan bahwa BK adalah polisi sekolah.
- 2) Pemberian skor tidak dilakukan oleh guru BK, BK hanya bagian dari sistem. Guru BK dilibatkan dalam penskoran tapi bukan untuk penskoran, guru BK ditekankan untuk memberikan penjelasan dan pemahaman pada siswa mengapa dia

di skor, jadi bukan pada proses penskorannya. Hal ini supaya anak menyadari kesalahan dan tidak akan mengulangi lagi di masa yang akan datang.

Di SMA N 2 Lubuk Pakam masih ada juga beberapa siswa yang masih menganggap BK sebagai polisi sekolah, walaupun sebenarnya sebutannya bukan menganggap BK polisi sekolah, hanya saja siswa masih enggan datang ke ruang BK tapi tidak menganggapnya sebagai polisi sekolah, karena disini BK tidak dilibatkan dalam bentuk – bentuk punishment. Hukuman itu ada tim tersendiri. Tugas BK adalah mencari akar permasalahan dan alternatif pemecahan, jadi hanya membantu saja bukan untuk menghukum.

Dapat di tarik kesimpulan bahwa siswa di SMA N 2 Lubuk Pakam sebagian besar sudah tidak menganggap BK sebagai polisi sekolah, dikarenakan guru BK tidak menghukum dan memberikan poin kepada siswa. Hal ini merupakan salah satu bentuk kebijakan dari kepala sekolah yang tidak menyuruh guru BK untuk menghukum siswa, dan tidak memasukkan BK ke dalam tim STP2K yang bertugas menghukum siswa. Artinya kepala sekolah sudah mempunyai pemahaman bahwa guru BK bukan orang yang bertugas menghukum siswa, akan tetapi menjadi sahabat bagi siswa. Akan tetapi, masih banyak siswa yang enggan untuk datang ke BK, mereka belum mempunyai kesadaran untuk mendatangi BK, karena mereka masih beranggapan bahwa BK adalah tempatnya orang yang bermasalah sehingga peran dan fungsi BK masih belum dimanfaatkan secara maksimal oleh siswa.

Anggapan guru mapel lain mengenai guru BK di SMA N 2 Lubuk Pakam, di setiap sekolah masih ada

beberapa guru lain yang beranggapan bahwa guru BK tidak ada kerjanya. Anggapan ini muncul terutama pada guru yang sudah senior, karena mereka jarang berinteraksi langsung dengan guru BK. Untuk mengantisipasi hal yang seperti itu, kepala sekolah menekankan kepada guru BK supaya banyak berkarya, supaya publik tahu kalau BK banyak kegiatannya. Kepala sekolah juga banyak melakukan koordinasi dan menekankan kepada guru BK untuk selalu memberikan kontribusi kepada yang lain. Selama BK tidak bisa memberikan kontribusi kepada yang lain, maka BK tidak akan dianggap dan tidak dibutuhkan.

- 1) Kepada guru yaitu pada saat rapat dan *breafing* sedikit menyinggung tentang peranan BK agar tidak terjadi kesalahpahaman antara guru mengenai tugas dan fungsi BK
- 2) Masyarakat, khususnya orang tua wali siswa yaitu pada saat pertemuan orang tua siswa, rapat pleno, dan rapat persiapan ujian.
- 3) Kepada siswa yaitu melalui layanan BK pada masing – masing kelas, pada saat masa orientasi siswa (MOS) diberikan penjelasan mengenai peran dan fungsi BK, pada saat upacara sedikit menyinggung tentang BK agar siswa bisa memanfaatkan secara optimal keberadaan BK di sekolah.

Di SMA N 2 Lubuk Pakam, program disusun awal tahun, biasanya setiap semester diadakan koordinasi untuk berdiskusi. Koordinasi itu berupa evaluasi program semester yang lalu kemudian apabila ada permasalahan maka direncanakan tindak lanjut dari permasalahan itu. Koordinasi melibatkan kepala sekolah, koordinator BK, serta melibatkan kepala sekolah, koordinator BK, dan guru BK, serta melibatkan pihak lainnya yang terkait dan disesuaikan dengan program

sekolah. biasanya dalam 1 tahun supervisi layanan dilakukan sebanyak 1 kali, dan supervisi administrasi disesuaikan dengan kebutuhan, biasanya 3 bulan sekali.

Supervisi terhadap BK di SMA N 2 Lubuk Pakam biasanya dilakukan temporer dan berkelanjutan. Setiap satu bulan diadakan pengecekan, baik yang terjadwal maupun spontanitas. Supervisi tersebut meliputi supervisi administrasi seperti satlan, program tahunan, semesteran, bulanan, mingguan dan semua perangkat layanan.

Kepala sekolah SMA N 2 Lubuk Pakam biasanya melakukan supervisi terhadap pelaksanaan progra BK tiap 1 semester sekali. Prosedur penyelenggaraannya adalah dengan menjadwalkan kapan diadakan supervisi, kisi kisi yang harus dipersiapkan dan bidang apa saja yang harus di supervisi, setelah itu baru dilaksanakan supervisi dan diakhiri dengan diskusi dan *follow up*.

2. Pembahasan Penelitian

Keberadaan sekolah adalah sebagai lembaga formal dalam penyelenggaraan kebijakan pendidikan nasional atau kebijakan dinas pendidikan kabupaten / kota dalam kekuasaan dan kewenangan kepala sekolah bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan pendidikan nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan kepala sekolah bertanggung jawab penuh akan sekolah tersebut. sehubungan dengan hal itu seorang kepala sekolah merupakan kunci keberhasilan suatu lembaga. Karena kepala sekolah adalah seorang pemimpin di lembaganya dan ia yang membawa lembaganya ke arah tujuan yang ingin dicapai oleh lembaga tersebut.

Kepala sekolah dikatakan berhasil apabila mereka memahami keberadaan

sekolah sebagai organisasi yang kompleks dan unik, serta mampu melaksanakan peranan kepala sekolah sebagai orang yang diberi tanggung jawab untuk memimpin sekolah. Keberhasilan sekolah adalah merupakan salah satu usaha dari kepala sekolah. Dimana kepala sekolah tersebut menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Untuk mencapai peningkatan mutu sekolah, maka seorang kepala sekolah sebagai petugas profesional dituntut untuk memformasikan, mengimplementasikan dan mengevaluasi kebijakan pendidikan. Kebijakan sekolah merupakan suatu turunan dari kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.

Kebijakan yang pertama yaitu mengenai kualifikasi akademik konselor. Pelayanan bimbingan dan konseling yang bermutu yaitu pelayanan yang mampu mengarahkan, mengemaskan potensi dan tugas – tugas perkembangan individu yang menyangkut kawasan kematangan personal dan emosional, sosial, pendidikan, dan karir. Perwujudan pelayanan bimbingan dan konseling yang bermutu dipengaruhi salah satunya yaitu kinerja guru BK. Hal ini dikarenakan seorang guru BK yang mempunyai kinerja yang berkualitas akan menampilkan sikap produktif, memiliki motivasi yang tinggi, disiplin, kreatif, inovatif, dan mandiri dalam melaksanakan peran dan tugasnya sehingga pelayanan bimbingan dan konseling yang dilakukan sesuai dengan beban kerja wajib yang diterimanya.

Pada dasarnya kinerja guru BK Profesional ditentukan oleh standar kualifikasi akademik dan kompetensi, serta kesejahteraan. Penetapan standar kualifikasi akademik dan kompetensi terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi

Konselor (SKAKK) Pasal 1 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa untuk dapat diangkat sebagai konselor, seseorang wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor yang berlaku secara nasional. Sedangkan kesejahteraan guru BK terkait dengan tunjangan yang diberikan kepada konselor yang telah bersertifikasi. Kesejahteraan yang memadai akan mendorong, memotivasi kepada guru BK agar melakukan peran dan tugasnya secara profesional secara sungguh – sungguh.

Pelayanan bimbingan dan konseling yang dilakukan juga harus sesuai dengan peraturan pemerintah tersebut yaitu beban kerja wajib yang diterima oleh guru BK adalah paling kurang 150 (seratus lima puluh) orang siswa dan paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) orang siswa.

Berdasarkan hasil penelitian, guru BK di SMA N 2 Lubuk Pakam hampir semuanya memenuhi kriteria tersebut. Artinya kepala sekolah juga sudah memahami bahwa tugas dari guru BK mengampuh 150 siswa, sehingga kepala sekolah tidak memberi kebijakan dengan memberikan beban kerja wajib dibawah 150 siswa ataupun melebihi beban kerja wajib paling banyak yaitu 250 siswa. Kalaupun ada beberapa guru BK yang belum memenuhi itu dikarenakan kondisi sekolah yang demikian, misalnya karena kekurangan jumlah siswa.

Berdasarkan penjelasan diatas sangat jelas bahwa kepala sekolah merupakan supervisor yang berfungsi atau berperan memberikan layanan dan bantuan kepada seluruh staf baik guru maupun personil sekolah lainnya termasuk guru BK agar mampu melaksanakan tugas dengan sebaik baiknya. Akan tetapi pelaksanaan supervisi BK oleh kepala sekolah di

SMA N 2 Lubuk Pakam masih belum optimal. Karena biasanya hanya dilakukan supervisi administrasi saja dan itupun tidak pasti dilaksanakan. Kepala sekolah masih belum memahami bagaimana prosedur supervisi yang seharusnya dilakukan.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang kebijakan kepala sekolah terhadap pelayanan bimbingan dan konseling di SMA N 2 Lubuk Pakam diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1) Pada dasarnya kebijakan kepala sekolah terhadap pelayanan bimbingan dan konseling di SMA N 2 Lubuk Pakam mengimplementasikan kebijakan turunan dari kebijakan pendidikan nasional dan berdasarkan aturan yang ada dari pemerintah pusat, akan tetapi diinovasi dan dikembangkan sendiri oleh sekolah sesuai kebutuhan dan kondisi dari masing – masing sekolah. Secara umum kepala sekolah sudah mengetahui dan memahami peran serta tanggung jawab kepala sekolah terhadap pelayanan bimbingan dan konseling, akan tetapi dalam pelaksanaannya kepala sekolah kurang menerapkan pemahaman tersebut serta kurang melihat kebutuhan dari guru BK dan siswa. Kebijakan yang sudah bagus dan sesuai yaitu mengetahui guru BK yang sudah tidak dijadikan sebagai pemberi hukuman, sedangkan yang kurang bagus pengimplementasiannya yaitu dalam hal koordinasi dan supervisi.

Faktor pendukung kebijakan sekolah terhadap pelayanan bimbingan dan konseling di SMA N 2 Lubuk Pakam yaitu pemahaman kepala sekolah akan tugas dan tanggung jawabnya terhadap BK di sekolah sudah cukup baik . Sedangkan faktor penghambat kebijakan kepala sekolah terhadap pelayanan bimbingan dan konseling

adalah (1) Kurangnya koordinasi; (2) BK kurang diprioritaskan; (3) Kesalahpahaman BK untuk mengatasi masalah; (4) Masih ada beberapa konselor dengan latar belakang pendidikan non BK. Berdasarkan guru.

DAFTAR PUSTAKA

- Afudin dan Ahmad Saebani. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta
- Direktorat Jendral PMPTK. 2007. *Rambu-rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam jalur Pendidikan Formal*. Jakarta.
- Prayitno dan Erman Amti, 2004. *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, Jakarta PT Rineke Cipta.
- Fattah, Nanang. 2012. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdaharya.
- Moleong, LexY J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*. Bambang Rosdaharya.
- Mulianingsih, Endang, Endang. 2003. *Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.